

Polri dari *Combatan* Menuju *Civilian*

Oleh: **Tenku Eddy Faisal Rusydi**

Kandidat Master Bidang Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta



Suasana tenang dan damai dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Terhitung sejak tanggal 1 April 1999 dibawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri Lembaga Kepolisian Negara republik Indonesia resmi berpisah dari kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan ini merupakan langkah awal bagi lembaga Kepolisian republik Indonesia berusaha membenahi dirinya dari stigma sebelumnya "combatan" menuju "civilian" disamping

perubahan pembagian tugas yang signifikan kedepan, dimana tentara sesuai dengan keahliannya akan menepati posisi sebagai aparat pertahanan, sedangkan polisi akan lebih konsen berada dan mendampingi, melindungi, serta mengayomi masyarakat sebagai aparat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban sosial (social order), yang dalam konteks ini polisi merupakan bagian dari komunitas masyarakat,

demikian juga sebaliknya masyarakat merupakan bagian dari polisi. Dengan demikian polisi dan masyarakat dapat dideskripsikan seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan dan tetap saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain.

Lebih jauh kebijakan pemisahan Polri dari tubuh ABRI dipertegas dengan lahirnya TAP MPR No. VII/MPR/2000 berkenaan dengan fungsi dan peran TNI-POLRI, dimana dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa untuk urusan keamanan dalam Negara diserahkan kepada lembaga kepolisian. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional tersebut maka dicabut UU No. 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan digantikan dengan UU No. 2/2002 perihal yang sama di dalam pasal 2 UU tersebut semakin dipertegas bahwa fungsi Polri adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi yang menjadi persoalan *Lita* bersama dalam konteks ini adalah upaya merubah perilaku anggota Polri dari paradigma lama "militeristik" ke paradigma baru "polisi sipil" dan ini bukanlah pekerjaan gampang, karena lembaga kepolisian yang selama bertahun-tahun berada dan bersatu dibawah naungan militer tentu akan banyak mewarisi pendekatan dan praktek militerisasi dalam perilakunya, dan upaya untuk merubah paradigma lama tersebut penulis merasa harus mendapatkan perhatian serius dengan melibatkan semua unsur yang tidak hanya pihak kepolisian saja, melainkan juga masyarakat, praktisi, dan akademisi.

Oleh karena itu dalam konteks ini masyarakat diharapkan agar tidak pesimis dengan lembaga kepolisian karena itu merupakan beban dan tanggung jawab kita bersama, kalau masyarakat merasa pesimis dan lebih mengedepankan prasangka buruk dalam berbagai tempat dan dimensinya terhadap lembaga ini, maka harus dipahami bahwa kedepan yang bakal mendapatkan kesulitan adalah masyarakat juga karena lembaga kepolisian merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah Negara dimana setiap Negara yang lahir dijagat raya ini pasti membentuk lembaga kepolisian karena lembaga ini yang secara langsung berhadapan dengan kepen-

tingan dan menjadi penengah terhadap konflik asasi masyarakat (state of nature). Disamping itu juga harus dipahami bahwa faktor utama dari kekuatan polisi adalah persetujuan atau dukungan dari masyarakat dan keberhasilan polisi di sebuah Negara dalam menegakkan supremasi hukum terletak pada kemajuan institusi kepolisian untuk memperoleh dukungan dan persetujuan dari masyarakat tadi. Dengan demikian hubungan baik yang bisa bertahan lama, berkelanjutan dan pendekatan saling percaya (*Trust*) antara pihak kepolisian dengan masyarakat menjadi pembicaraan penting (*central issues*) dalam konteks ini.

Simbol dan Praktek Kekerasan

Dalam pengamatan penulis, dalam upaya merubah paradigma Polri dari "militeristik" ke paradigma "Polisi Sipil" kedepan yang harus diperhatikan bersama oleh semua pihak, khususnya pengambil kebijakan dilingkungan Polri adalah persoalan simbol, semboyan dan doktrin militer dalam tubuh Polri yang dianggap masih eksis sampai dengan sekarang senerti "Patah Tumbuh, Hilang Berganti", panggilan "komandan" kepada atasan, peraturan baris berbaris ala militer dan pendidikan di Lemdik Polri yang sarat dengan muatan militer. Karena menurut hemat penulis symbol, semboyan, dan doktrin yang sehari-hari secara continue diucapkan, dilakukan dan bahkan dihayati oleh anggota polisi ikut ambil andil yang sangat besar terhadap pembentukan pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka sehingga sangat dimungkinkan tingkah laku, pola pikir dan sikap mereka mengikuti doktrin tersebut yang pada gilirannya melahirkan oknum-oknum polisi yang keras dan kasar terhadap masyarakatnya.

Solusi

Berhubungan dengan deskripsi diatas, melalui tulisan ini penulis melihat solusi yang harus dilakukan kedepan adalah para pengambil kebijakan dilingkungan Polri harus lebih sering melakukan diskusi, koordinasi dan sharing pendapat dengan melibatkan semua pihak dalam rangka mencari jati diri Kepolisian Republik Indonesia yang sejati, apa yang telah dilakukan dan bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana sejarah masa silam yang mengotori

citra polisi di mata masyarakat dan bahkan di mata dunia Internasional harus dijadikan pelajaran berharga guna membangun citra dan anggota polri yang berharkat dan bermatabat. Hal tersebut menjadi urgen dilakukan karena menurut hemat penulis, untuk melihat lembaga Kepolisian Republik Indonesia hari ini disamping dalam paradigma Polri sendiri juga harus dengan perspektif masyarakat karena mereka yang secara keseluruhan berhadapan langsung dengan lembaga ini dengan beragam kepentingannya. Dengan demikian bagaimana jati diri kepolisian yang sesungguhnya adalah pihak luar kepolisian yang lebih mengerti yang dalam hal ini masyarakat, baik itu masyarakat luas, akademisi atau bahkan praktisi. Dan dari pandangan serta masukan dari kalangan masyarakat tersebut, pihak kepolisian dapat membenahi dirinya sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat itu sendiri, sehingga dapat terbentuk suatu hubungan kerjasama dan hubungan saling percaya (*Trust*) diantara keduanya yang pada gilirannya masyarakat akan memberikan apresiasi dan persetujuan penuh terhadap tugas dan kinerja kepolisian dan ini merupakan bentuk lain dari keberhasilan Polri dalam mencapai tujuan penegakan tujuan penegakan supremasi hukum di tanah air.

Selanjutnya disamping diskusi, koordinasi dan sharing pendapat dengan melibatkan semua pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, langkah berikut yang perlu dilakukan adalah pembenahan disektor pendidikan Polri sendiri. Hal ini dilakukan untuk merubah kultur dan paradigma tadi dari "militeristik" ke "polisi sipil", pembenahan di sektor pendidikan yang dikehendaki dalam konteks ini adalah: yang pertama **jenjang pendidikan sebagai persyaratan untuk dapat diterima bagi calon anggota Polri minimal harus dari pendidikan Diploma dan tidak lagi dari SMU**, hal ini didasari oleh sebuah asumsi bahwa lingkungan tempat tinggal dan tempat bermain seseorang sangat berpengaruh terhadap proses kematangan jiwa seseorang, lingkungan SMU merupakan lingkungan remaja yang masih berusaha mencari jati diri keremajaannya. Nah bila kemudian seorang remaja yang masih dan belum menemukan hakikat jati dirinya yang sesungguhnya kemudian diterima dan menjadi seorang

Tamtama/Bintara/Perwira Polisi yang bertugas untuk memimpin, melindungi, dan mengayomi masyarakat, dapat digeneralkan tugas dan fungsi Negara yang di embankan kepada dirinya tidak bisa berjalan dengan optimal. Akan tetapi bila seorang anggota polisi masuk dan diterima sebagai aparat kepolisian dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi dapat dipastikan proses pematangan jiwa, emosi, dan kendali atas diri sendiri jauh lebih sempurna daripada remaja lulusan SMU dan hal ini tentu akan berimplikasi terhadap tugas dan peran Negara yang berusaha diembannya. Selanjutnya yang kedua, penulis melihat bahwa setelah jenjang pendidikan bagi calon Tamtama atau calon Bintara tidak hanya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, hal ini didasari oleh sebuah asumsi normatif bahwa sangat tidak mungkin untuk merubah pola pikir, watak, dan perilaku seorang calon anggota Polri dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda hanya relatif lebih lama, kemudian kurikulum yang mengedepankan aspek teoritis dan pelajaran kelas tanpa mengabaikan aspek latihan fisik. Bila latihan phisik lebih ditonjolkan, maka besar peluang reformasi kepolisian dari paradigma "militeristik" ke "Polisi Sipil" menjadi tidak berguna dalam konteks ini.

Dan solusi yang terakhir penulis melihat agar lembaga **Kepolisian Republik Indonesia tetap menjadi "Polisi Sipil" sesuai dengan harapan dan tuntutan banyak pihak, maka dalam konteks ini Polri sudah selayaknya berada pada posisi sekarang yang bertanggung jawab kepada Presiden** dan segala polemik yang telah dilakukan selama ini untuk dihentikan. Perdebatan seputar Polri idealnya berada dibawah departemen tertentu menurut hemat penulis perdebatan yang tidak perlu diteruskan, karena bila perdebatan ini yang terus dikemukakan, maka kemudian energi Polri akan terkuras habis untuk mencari format posisinya disamping energi yang terbuang untuk menuai kritikan dari masyarakat, jadi kapan Polri akan berfikir untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat?. Lebih lanjut asumsi ini juga didasari oleh paradigma berfikir bahwa "Posisi Polri sekarang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, masih terlihat banyak kekurangannya, konon lagi Polri harus berada di bawah intervensi departemen tertentu".***